

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, PENELITIAN TERDAHULU, DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tanaman padi

Tanaman padi (*Oryza sativa* L.) merupakan salah satu tanaman pangan strategis dan sangat penting secara ekonomi serta sosial di banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut Monareh dan Ogie (2020) padi (*Oryza sativa* L.) merupakan tanaman semusim dengan morfologi berbatang bulat dan berongga daunnya memanjang dengan ruas menunjukkan bentuk khas dan siklus hidup yang teradaptasi untuk pertanian sawah. Padi memiliki siklus hidup yang cukup sensitif terhadap lingkungan dan teknik budidaya, sehingga pertumbuhan dan hasil akhirnya dipengaruhi oleh interaksi genotipe, lingkungan, dan perlakuan budidaya. Studi menunjukkan bahwa pertumbuhan vegetatif padi, seperti tinggi tanaman dan jumlah daun, merupakan indikator penting dalam menentukan potensi hasil padi di kemudian hari baik pada fase awal vegetatif maupun generatif (Bawamenewi dkk 2025)

2.1.2 Usahatani Padi

Usahatani merupakan suatu kegiatan pengelolaan sumber daya pertanian yang dilakukan untuk memperoleh hasil dan keuntungan secara optimal. Dalam kegiatan usahatani, petani memanfaatkan faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, modal, dan teknologi untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Menurut Soekartawi (2006) usahatani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien guna memperoleh keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu, pengelolaan faktor produksi yang tepat sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu usahatani.

Keberhasilan usahatani dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor teknis maupun nonteknis. Faktor teknis meliputi penggunaan benih unggul, pemupukan, pengairan, pengendalian hama dan penyakit, serta penerapan teknologi pertanian. Sementara itu, faktor nonteknis mencakup kemampuan manajemen petani, pengalaman bertani, kondisi sosial ekonomi, serta akses terhadap informasi dan modal usaha. Menurut Suratiyah (2015), kemampuan petani dalam

mengombinasikan faktor-faktor produksi secara efisien akan menentukan tingkat produktivitas dan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usahatani.

Dalam kegiatan usahatani, analisis biaya dan pendapatan menjadi hal yang penting untuk mengetahui tingkat keuntungan usaha yang dijalankan. Pendapatan usahatani diperoleh dari selisih antara total penerimaan hasil produksi dengan total biaya yang dikeluarkan selama proses produksi berlangsung. Biaya tersebut meliputi biaya tetap dan biaya variabel seperti biaya tenaga kerja, benih, pupuk, pestisida, dan alat pertanian. Menurut Daniel (2002), analisis usahatani dilakukan untuk menilai efisiensi penggunaan biaya produksi sekaligus mengetahui kelayakan suatu usaha pertanian.

Selain itu, perkembangan teknologi pertanian juga berpengaruh terhadap peningkatan efisiensi usahatani. Penggunaan alat dan mesin pertanian modern dapat membantu petani mengurangi penggunaan tenaga kerja serta mempercepat proses produksi. Dukungan pemerintah melalui penyuluhan pertanian, bantuan sarana produksi, dan akses pembiayaan juga menjadi faktor penting dalam pengembangan usahatani. Fatmawati dkk (2023), menyatakan bahwa pengelolaan usahatani yang baik dapat meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

2.1.3 Biaya

Biaya usahatani merupakan seluruh pengeluaran ekonomi yang digunakan dalam proses produksi pertanian untuk memperoleh hasil produksi. Soekartawi (2006) menjelaskan bahwa biaya usahatani adalah semua pengorbanan ekonomi yang dinilai dalam bentuk uang dan digunakan selama kegiatan produksi berlangsung. Dalam teori ekonomi, Mankiw (2018), menyatakan bahwa biaya produksi merupakan nilai sumber daya yang dikorbankan untuk menghasilkan barang dan jasa. Biaya tersebut dibedakan menjadi biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya variabel (*variable cost*). Biaya tetap merupakan biaya yang jumlahnya tidak dipengaruhi oleh tingkat produksi, sedangkan biaya variabel berubah sesuai dengan jumlah produksi yang dihasilkan.

Dalam kegiatan usahatani, biaya produksi terdiri atas berbagai komponen yang mendukung proses produksi pertanian. Suratiyah (2015) menyebutkan bahwa biaya tetap meliputi sewa lahan, pajak tanah, dan penyusutan alat pertanian,

sedangkan biaya variabel mencakup biaya benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Penggunaan faktor produksi tersebut akan memengaruhi besarnya biaya yang dikeluarkan petani dalam menjalankan usahatani. Daniel (2002) menjelaskan bahwa biaya tenaga kerja menjadi salah satu komponen biaya terbesar karena seluruh tahapan produksi pertanian, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga panen membutuhkan tenaga kerja.

Analisis biaya usahatani dilakukan untuk mengetahui besarnya pengeluaran yang digunakan selama proses produksi serta untuk mengukur tingkat efisiensi usaha tani. Rahim dan Hastuti (2007) menyatakan bahwa analisis biaya digunakan sebagai dasar dalam menghitung pendapatan dan keuntungan usahatani sehingga dapat diketahui tingkat kelayakan suatu usaha pertanian. Dengan adanya analisis biaya, penggunaan faktor produksi dapat dilakukan secara lebih efisien sehingga kegiatan usahatani dapat memberikan hasil yang optimal.

2.1.4 Penerimaan

Penerimaan usahatani merupakan nilai ekonomi yang diperoleh dari hasil penjualan produk pertanian dalam suatu periode produksi. Menurut Mankiw (2018), penerimaan adalah sejumlah pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan barang atau jasa dalam suatu kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan usahatani, penerimaan dihitung dari hasil perkalian antara jumlah produksi dengan harga jual komoditas pertanian. Oleh karena itu, besarnya penerimaan dipengaruhi oleh tingkat produksi yang dihasilkan serta kondisi harga komoditas di pasar.

Suratiah (2015) menjelaskan bahwa penerimaan usahatani terdiri atas penerimaan kotor dan penerimaan bersih. Penerimaan kotor merupakan seluruh nilai produksi sebelum dikurangi biaya produksi, sedangkan penerimaan bersih diperoleh setelah total penerimaan dikurangi seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi berlangsung. Besarnya penerimaan juga dipengaruhi oleh penggunaan faktor produksi seperti luas lahan, tenaga kerja, modal, dan teknologi yang digunakan dalam kegiatan pertanian.

Rahim & Hastuti (2007) menyatakan bahwa penerimaan usahatani dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai tingkat keberhasilan suatu usaha pertanian karena berkaitan dengan hasil ekonomi yang diperoleh petani. Sejalan dengan pendapat tersebut, Daniel (2002) menjelaskan bahwa analisis penerimaan

diperlukan untuk mengukur efisiensi usaha dan menjadi dasar dalam perhitungan pendapatan serta keuntungan usahatani. Dengan demikian, penerimaan usahatani tidak hanya menunjukkan nilai hasil produksi yang diperoleh, tapi juga menjadi dasar perhitungan pendapatan dan kelayakan usahatani.

2.1.5 Pendapatan

Pendapatan usahatani merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengetahui hasil akhir dari kegiatan produksi pertanian. Pendapatan diperoleh dari selisih antara total penerimaan yang diterima petani dengan seluruh biaya produksi yang dikeluarkan selama proses usahatani. Mankiw (2018) menyatakan bahwa pendapatan dalam suatu kegiatan ekonomi menunjukkan hasil yang diperoleh setelah dikurangi biaya atau pengorbanan yang digunakan dalam proses produksi. Oleh karena itu, tingkat pendapatan mencerminkan kemampuan suatu usaha dalam menghasilkan keuntungan.

Dalam kegiatan usahatani, besar kecilnya pendapatan dipengaruhi oleh jumlah produksi, harga jual komoditas, serta efisiensi penggunaan faktor produksi. Suratiyah (2015) menjelaskan bahwa pendapatan usahatani akan meningkat apabila penerimaan yang diperoleh lebih besar dibandingkan biaya produksi yang dikeluarkan. Biaya produksi tersebut meliputi biaya tetap dan biaya variabel yang digunakan selama proses produksi berlangsung. Dengan demikian, pengelolaan biaya secara efisien menjadi faktor penting dalam meningkatkan pendapatan petani.

Fatmawati dkk (2023) mengemukakan bahwa analisis pendapatan usahatani dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan efisiensi usaha pertanian. Pendapatan yang diperoleh petani dapat digunakan sebagai ukuran kemampuan usahatani dalam memberikan keuntungan ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, Rahim dan Hastuti (2007) menjelaskan bahwa analisis pendapatan diperlukan untuk mengetahui kelayakan usaha serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pada kegiatan usahatani. Dengan adanya analisis pendapatan, petani dapat mengetahui tingkat keuntungan yang diperoleh dari usaha pertanian yang dijalankan.

2.1.6 Status Penguasaan Lahan

Secara umum, status penguasaan lahan di kalangan petani dapat diklasifikasikan menjadi petani pemilik, penyewa, penggarap, dan pemilik-

penggarap. Pada penelitian ini, petani dengan status penggarap menerapkan sistem bagi hasil *maro*, yaitu pembagian hasil panen sebesar 50:50 antara pemilik lahan dan penggarap setelah memenuhi ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sistem ini merupakan salah satu bentuk penguasaan lahan yang masih banyak diterapkan di pedesaan. Dalam penelitian mengenai penguasaan lahan sawah, ditemukan bahwa hubungan sakap (bagi hasil) lebih lazim dibandingkan sistem sewa-menyewa, bahkan di antara petani yang telah memiliki lahan sendiri terdapat status rangkap sebagai pemilik sekaligus penggarap (Somantri, 1984). Kajian lain menegaskan bahwa status penguasaan lahan tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga berdampak nyata terhadap pendapatan petani. Abas dkk. (2024) menunjukkan bahwa status kepemilikan lahan di Desa Bongoime terdiri atas 50% petani pemilik dan 50% petani penyakap, dengan rata-rata pendapatan petani pemilik sebesar Rp8.378.348 per petani, sedangkan petani penyakap sebesar Rp5.922.167 per petani. Selain itu, status penguasaan lahan juga memengaruhi tingkat risiko dan keputusan petani dalam menjalankan usahatani. Menurut Wulandari dkk. (2022), petani penyewa maupun petani bagi hasil menghadapi risiko yang lebih tinggi karena ketika terjadi gagal panen, mereka tetap memiliki kewajiban memenuhi pembayaran sewa atau pembagian hasil sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Petani penggarap menunjukkan banyak tantangan struktural dan hukum. Dalam penelitian di Kabupaten Gowa, Siti dkk (2021) menyatakan bahwa sistem bagi hasil dilakukan secara lisan tanpa ada bukti di atas kertas antara pemilik modal dan penggarap. Selain itu, menurut Pratiwi dkk (2021) risiko dan potensi kerugian terbesar ada pada pihak petani penggarap karena minimnya perlindungan dari kontrak tertulis. Di sisi akses penguasaan lahan, Hamidah, (2016) menemukan bahwa sebagian besar (90%) keluarga petani penggarap memiliki pekerjaan/usaha keluarga selain bertani sehingga petani penggarap yang awalnya berstatus sebagai petani yang tidak memiliki lahan, sekarang mereka telah berhasil menjadi petani penggarap lahan sendiri. Sementara dari segi legal formal, Lemmy dan Ramadhani, (2022) mengungkap bahwa dalam penggarapan lahan bekas HGU, tidak ada dasar hukum yang pasti menjamin memberikan perlindungan kepada lahan yang dikuasai oleh petani ketika HGU telah berakhir.

2.1.7 Kelayakan Usahatani Padi

Kelayakan usahatani merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menilai apakah suatu kegiatan usaha pertanian dapat memberikan keuntungan dan layak untuk dijalankan. Dalam kegiatan ekonomi, kelayakan usaha berkaitan dengan kemampuan suatu usaha dalam menghasilkan penerimaan yang lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Mankiw (2018) menjelaskan bahwa suatu kegiatan produksi dikatakan layak apabila mampu memberikan manfaat ekonomi melalui penggunaan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, analisis kelayakan diperlukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan keuntungan suatu usaha pertanian.

Dalam kegiatan usahatani, kelayakan usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti biaya produksi, penerimaan, pendapatan, penggunaan teknologi, serta kondisi pasar. Suratiyah (2015) menyatakan bahwa kelayakan usahatani dapat diketahui melalui perbandingan antara hasil penerimaan dengan total biaya produksi yang dikeluarkan selama proses usaha berlangsung. Semakin besar penerimaan yang diperoleh dibandingkan biaya produksi, maka usahatani tersebut dinilai semakin layak untuk diusahakan.

Fatmawati dkk (2023) menjelaskan bahwa analisis kelayakan usahatani dilakukan untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan faktor produksi serta kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan ekonomi. Salah satu indikator yang sering digunakan dalam analisis kelayakan adalah rasio penerimaan terhadap biaya atau *Revenue Cost Ratio* (R/C Ratio). Nilai R/C Ratio lebih dari satu menunjukkan bahwa usaha tani memperoleh keuntungan dan layak untuk dikembangkan, sedangkan nilai kurang dari satu menunjukkan bahwa usaha tani mengalami kerugian.

Pada usahatani padi, analisis kelayakan digunakan untuk mengetahui kemampuan usaha tani dalam memberikan keuntungan bagi petani. Rahim dan Hastuti (2007) menyatakan bahwa kelayakan usahatani padi dipengaruhi oleh tingkat produksi, harga jual gabah, biaya sarana produksi, serta penggunaan tenaga kerja selama proses budidaya. Dengan adanya analisis kelayakan, petani dapat mengetahui tingkat keuntungan yang diperoleh serta menentukan keputusan dalam pengembangan usahatani padi secara lebih efisien dan berkelanjutan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Pendapatan Petani Padi Penggarap di Desa Jorok Kecamatan Iwen eka Putri. Kabupaten Sumbawa	Roos Nana Sucihati,ku rniawansya h,& Wardani ien eka putri. (2022).	Produksi padi per musim tanam berkisar antara 3.000 hingga 5.500 kilogram, dengan biaya produksi sekitar enam hingga sembilan juta rupiah per musim. Pendapatan bersih yang diperoleh petani penggarap mencapai tujuh hingga dua puluh dua juta rupiah per musim tanam. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa usahatani padi bagi petani penggarap layak secara ekonomi, meskipun keuntungan yang diperoleh masih tergolong kecil dibandingkan dengan petani pemilik lahan.	fokus terhadap petani penggarap dan analisis pendapatan usahatani.	Teknik penentuan sampel dalam Penelitian ini menggunakan Rumus dari Arikunto (2010)
2	Analisis Kelayakan Usahatani Padi oleh Petani Penyakap di Desa Pogungjuruteng ah Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo	Nurahman, R.A., Hasanah, U., & Kusuma ningrum, A. (2023)	biaya produksi rata-rata mencapai sekitar dua juta empat ratus ribu rupiah, sedangkan penerimaan mencapai dua juta enam ratus ribu rupiah per musim tanam. Nilai R/C ratio yang diperoleh sebesar 1,08 menunjukkan bahwa usahatani masih layak secara ekonomi, meskipun margin keuntungannya tergolong tipis. Faktor pembagian hasil antara pemilik dan penggarap menjadi penentu utama pendapatan petani	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada subjek penelitian yang sama, yaitu petani penggarap	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus
3	Analisis Komparatif Biaya dan Pendapatan Usahatani Padi Sawah Antara Petani Anggota dan Non-Anggota Kelompok Tani di Desa Tiron Kecamatan Banyakan	Intan Aulia Rachmawati, Eko Yuliarsha Sidhi dan Wiwiek Andajani (2021)	tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada biaya produksi antara petani anggota dan non-anggota kelompok tani. Namun, pendapatan petani yang tergabung dalam kelompok tani lebih tinggi karena mereka memperoleh bantuan sarana produksi serta pelatihan teknis pertanian	Persamaan yaitu pada analisis digunakan yaitu analisis biaya dan pendapatan	Penelitian ini menggunakan uji statistik

No	Judul	Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Kabupaten Kediri				
4	Analisis Kelayakan Usahatani Padi Sawah di Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan	Hamdik dan Sumarno (2025)	usahatani padi di daerah tersebut layak secara ekonomi dengan nilai R/C ratio di atas 1. Faktor-faktor seperti luas lahan, pengalaman bertani, dan penggunaan pupuk berpengaruh terhadap tingkat pendapatan petani.	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada tujuan untuk menilai kelayakan usahatani padi.	perbedaan ya terdapat pada objek penelitian yang berupa petani pemilik lahan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa usahatani padi pada umumnya masih layak secara ekonomi dengan nilai R/C ratio lebih dari 1 dan menghasilkan pendapatan yang positif. Penelitian oleh Roos Nana Sucihati dkk (2022) dan Nurahman dkk (2023) menunjukkan bahwa sistem bagi hasil menjadi faktor utama yang memengaruhi tingkat pendapatan petani penggarap. Sementara itu, penelitian Intan Aulia Rachmawati dkk. (2021) menekankan pentingnya kelembagaan kelompok tani terhadap peningkatan pendapatan, dan penelitian Hamdik dan Sumarno (2025) menunjukkan bahwa faktor luas lahan, pengalaman, serta penggunaan input produksi berpengaruh terhadap kelayakan usaha.

Penelitian ini memiliki unsur kebaharuan (*novelty*) karena objek yang diteliti tidak terbatas hanya pada petani penggarap, melainkan mencakup seluruh petani padi dengan perbedaan status penguasaan lahan, yaitu petani pemilik lahan, petani penggarap, dan petani penyewa. Pendekatan ini memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif dalam menganalisis kelayakan usahatani padi, karena setiap status penguasaan lahan memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal struktur biaya produksi, sistem pembagian hasil, tingkat risiko usaha, serta besaran pendapatan yang diterima.

Dengan memasukkan seluruh kategori petani berdasarkan status penguasaan lahan, penelitian ini mampu memberikan perbandingan yang lebih menyeluruh mengenai tingkat kelayakan finansial usahatani padi, sekaligus mengidentifikasi perbedaan efisiensi dan profitabilitas antar kelompok petani. Oleh karena itu, hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberikan gambaran parsial, tetapi juga

menghasilkan analisis yang lebih objektif dan representatif terhadap kondisi nyata usahatani padi di lokasi penelitian.

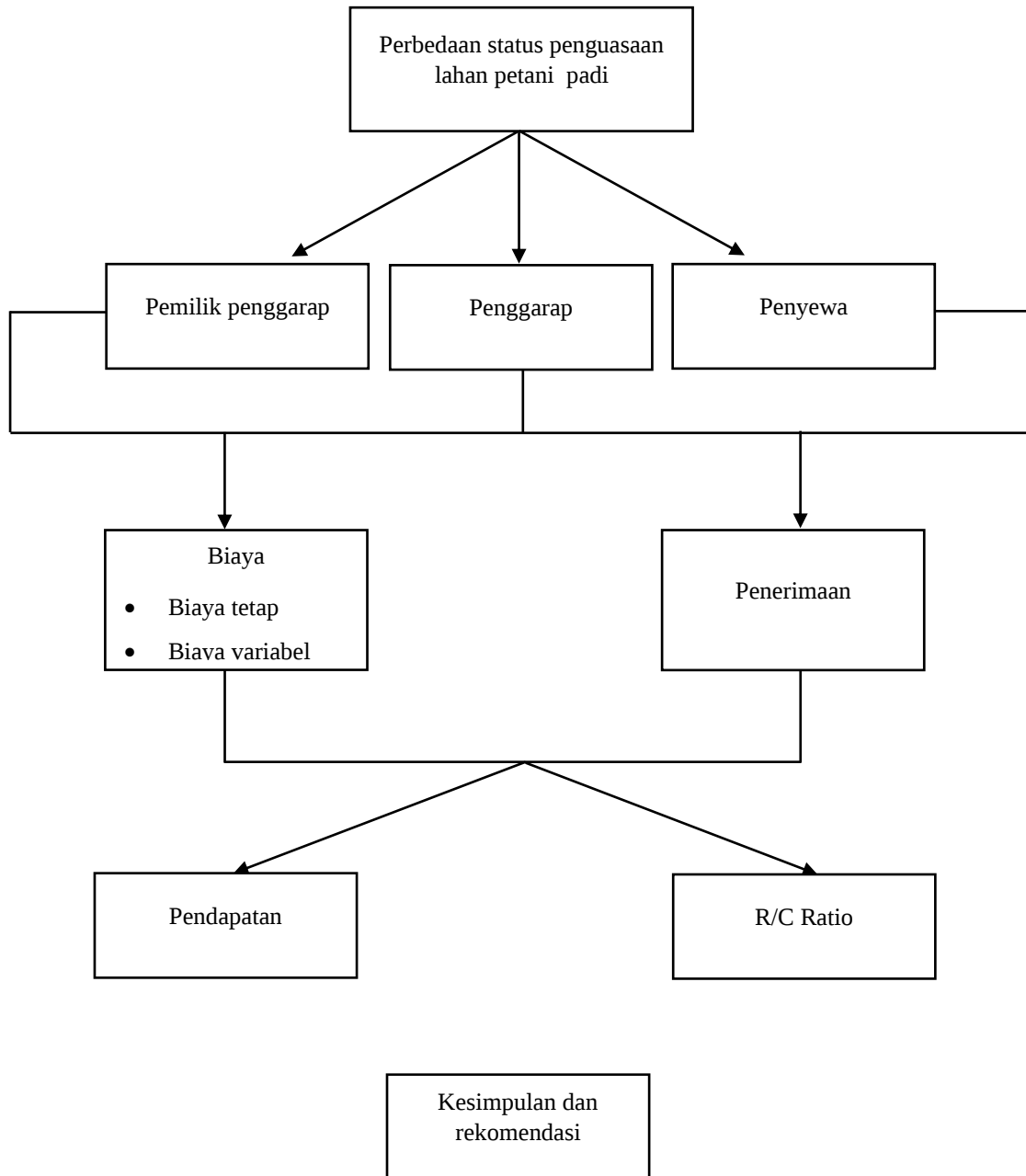
2.3 Pendekatan Masalah

Usahatani padi merupakan kegiatan yang sangat bergantung pada penggunaan faktor produksi, seperti lahan, tenaga kerja, benih, pupuk, dan teknologi budidaya. Di Desa Ciwarak, sebagian besar petani menjalankan usahatani dengan kondisi sumber daya yang terbatas, terutama bagi petani yang tidak memiliki lahan sendiri.

Di sisi lain, keberadaan petani dengan berbagai bentuk penguasaan lahan seperti petani pemilik penggarap, petani penggarap, dan petani penyewa menimbulkan dinamika tersendiri dalam struktur biaya dan pendapatan usahatani padi. Perbedaan status penguasaan lahan tersebut berpotensi memengaruhi beban biaya produksi yang harus ditanggung serta besarnya pendapatan yang diperoleh pada akhir musim tanam. Petani pemilik penggarap, misalnya, tidak menanggung biaya sewa lahan secara langsung, namun tetap memiliki beban biaya tetap tertentu seperti penyusutan alat. Sementara itu, petani penggarap dengan sistem bagi hasil maupun petani penyewa dengan sistem sewa harus menanggung konsekuensi pembagian hasil atau pembayaran sewa yang dapat mengurangi pendapatan yang diterima. Dalam kondisi tertentu, sistem bagi hasil atau tingginya biaya sewa lahan dapat menyebabkan pendapatan yang diterima lebih rendah dibandingkan nilai produktivitas yang dihasilkan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan apakah usahatani padi pada masing-masing status penguasaan lahan di Desa Ciwarak benar-benar memberikan keuntungan.

Selain perbedaan status penguasaan lahan, peningkatan biaya produksi serta fluktuasi harga gabah di tingkat petani menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi pendapatan bersih, baik bagi petani pemilik penggarap, penggarap, maupun penyewa. Untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya, diperlukan perhitungan biaya secara rinci yang meliputi biaya tetap dan biaya variabel, serta analisis penerimaan berdasarkan total produksi yang dihasilkan. Perbandingan antara total biaya dan total penerimaan pada masing-masing kelompok petani akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat kelayakan

usahatani padi yang dijalankan. Lebih jelasnya, alur skema pendekatan masalah dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Pendekatan Masalah